

BAB II

PELANGGARAN HAM DI MESIR ERA KEPEMIMPINAN AS-SISI

2.1 Profil Umum Negara Mesir

Negara Mesir atau biasanya disebut juga dengan Republik Arab Mesir merupakan negara yang secara geografi dan kependudukan terletak diantara persimpangan dua benua yaitu, Afrika dan Asia lebih tepatnya terletak di Afrika Utara dan Asia Barat. Bagian utara Negara ini berbatasan dengan Laut Tengah, di Timur Laut berbatasan dengan Jalur Gaza dan juga Israel, lalu di bagian selatan berbatasan dengan Sudan dan di sebelah barat dengan Sudan. Negara ini memiliki interaksi bersejarah dengan semua wilayah tetangganya. Negara ini memiliki kebudayaan yang kaya dan sejarah mesir kuno yang terkenal, selain itu sejarah kompleks terkait dunia politik Mesir juga sangat mewarnai perjalanan sejarah negara ini karena hampir tiga dekade diperintah oleh presiden yang dianggap diktator yakni Hosni Mubarak. Kini negara Mesir dipimpin oleh Abdul Fattah As-Sisi sebagai presiden Mesir yang menjabat dari tahun 2014. Mayoritas masyarakat di Mesir sendiri adalah penganut Islam Sunni. Kairo menjadi kota yang paling besar di Mesir sekaligus menjadi ibu kota negara ini. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dari negara ini. Adapun bentuk dari pemerintahan dari negara ini adalah republik. Pertanian, pariwisata dan juga industri menjadi jantung ekonomi bagi

negara ini. Mesir sendiri memiliki 2 musim, yakni musim panas dan juga musim dingin yang tidak terlalu ekstrim.²³

Mesir juga dapat dikonseptualisasikan sebagai oasis linier di Sahara Timur, yang melintasi beberapa wilayah Afrika. Negara ini diarusi oleh Sungai Nil. Negara Mesir dapat menjadi stasiun jalan atau berfungsi sebagai refugium, serta menjadi tempat pemukiman dengan strategi adaptif biologis dan budayanya sendiri. Persimpangan jalan dan oasis/refugium dari kedua perspektif ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang proses-proses yang dapat mempengaruhi populasi/masyarakat Lembah Nil.²⁴ Dari sudut pandang ini, presentasi ini akan memeriksa aspek-aspek yang mungkin disebut sebagai genetika sejarah Lembah Nil di dalamnya terdapat berbagai tingkat sejarah biokultural. Hal menarik di sini adalah pola variasi utara-selatan di Lembah Nil Mesir. Adapun tantangan serius dari negara permasalahan seperti ketegangan politik, ketidakstabilan ekonomi, permasalahan HAM, dan juga ancaman terorisme. Meskipun letak wilayah Negara Mesir ini sangat strategis di Benua Afrika akan tetapi negara ini masih belum bisa menyelesaikan permasalahan internal yaitu kekerasan, pelecehan, dan genosida.²⁵

Awal penyebabnya terjadi konflik di Negara Mesir yakni Revolusi Arab Spring pada tanggal 25 Januari 2011. Revolusi ini sudah terjadi sejak 2010 sampai 2011 dengan adanya pergolakan politik yang berupa aksi protes massa yang

²³ Farida, *Peran Ikhwanul Muslimin Dalam Perubahan Sosial Politik Di Mesir*. Jurnal Penelitian 8, no. 1 (2014): 45–70.

²⁴ Keita, S., & Boyce, A. (2005), *Genetics, Egypt, and History: Interpreting Geographical Patterns of Y Chromosome Variation*. *History in Africa*, 32, 221-246. doi:10.1353/hia.2005.0013

²⁵ Samir, *Kegagalan Demokratisasi Di Mesir Pasca-Arab Spring THE FAILURE OF DEMOCRATIZATION IN EGYPT POST ARAB SPRING*.

terjadi di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikenal sebagai *The Arab Spring*. Husni Mubarak yang merupakan penguasa diktator telah berhasil dilengserkan (pengunduran diri) melalui adanya revolusi yang terjadi pada tahun 2011 tersebut, hal ini menjadi kebangkitan demokrasi di Mesir.²⁶ Setelah lengsernya Husni Mubarak terjadilah sistem pemilihan umum yang dimenangkan Oleh Mohammed Mursi pada tahun 2013 dari golongan atau kelompok Ikhwanul Muslimin. Mesir telah menjadi saksi terkait dengan bagaimana perubahan sistem politik, konflik politik mereka hingga permasalahan HAM yang menjadi perhatian pada tingkat nasional maupun internasional pasca revolusi *The Arab Spring* dan juga adanya kudeta militer oleh Jenderal Militer mereka sendiri yakni Abdul Fattah As-Sisi pada tahun 2013. Kemudian pada Juni 2014, Abdul Fattah As-Sisi menjabat sebagai presiden dengan gaya kepemimpinan yang bisa disebut otoriter.²⁷

2.2 Pengertian HAM dan Pelanggaran HAM

HAM bisa dijelaskan sebagai hak-hak yang melekat secara alami dan inheren pada setiap individu dan diakui sebagai prinsip dasar bahwa hak-hak ini dilindungi oleh hukum dan prinsip etika universal tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status social bahkan asal-usul. HAM mencakup hak hidup dan mendapatkan prosedur hukum yang adil apabila hendak dijatuhkan eksekusi mati, hak kebebasan dan keamanan pribadi untuk tidak dianiaya atau ditahan secara

²⁶ Mohammand Riza Widyarsa, *Rezim Militer Dan Otoriter Di Mesir, Suriah Dan Libya*, Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial 1, no. 4 (2012): 273–83, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/74>.

²⁷ Heriyanto, *Solusi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi Di Mesir*.

sewenang-wenang, hak kebebasan berpendapat untuk berekspresi dalam menyampaikan pendapat tanpa rasa takut represi, kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan, hak kesetaraan di mata hukum tanpa adanya diskriminasi, hak untuk memilih dan dipilih dalam artian bisa berpartisipasi dalam pemerintahan maupun pemilihan umum, hak pendidikan dan hak kesehatan tanpa adanya diskriminasi juga mendapat pelayanan standard yang baik, hak untuk bekerja dengan kondisi yang layak dan upah yang adil, hak asosiasi untuk kebebasan membentuk kelompok atau entitas semacamnya, serta hak untuk perlindungan.²⁸

Amartya Sen menjelaskan bahwa konsep HAM dimulai dari hak untuk hidup dengan layak yang mencakup makanan, pendidikan, air, kebebasan berbicara, hak merdeka untuk mencapai kondisi kehidupan yang baik. Selanjutnya Sen juga menjelaskan bahwa HAM juga berkaitan dengan konsep pembangunan. HAM dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kemajuan. Konsep HAM juga berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sen berpendapat bahwa baik pemerintah dan Masyarakat sipil harus sama-sama memiliki komitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan dan keadilan yang bisa dibentuk melalui kebijakan. HAM juga bisa digunakan sebagai indikator sejauh mana keberhasilan pembangunan dalam mengedepankan kesejahteraan rakyat.²⁹

Amartya Sen juga menegaskan bahwa konsep HAM bukan hanya sekedar konsep hukum tapi juga harus bisa dipahami dalam konteks kultural. Maksudnya yakni ada prinsip universal yang harus dihormati oleh semua golongan

²⁸ Bobi Aswandi and Kholis Roisah, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019): 128, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

²⁹ Christopher W. Morris, *Amartya Sen*, 2009, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511800511>.

Masyarakat yaitu hak-hak dasar untuk hidup secara layak. HAM juga berperan penting dalam pembangunan dan kemajuan sosial suatu bangsa untuk mencapai keadilan sosial.

HAM dalam melindungi dan menghormati hak-hak individu menjadi dasar bagi konvensi hukum nasional maupun internasional, selain itu HAM juga menjadi pondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menjunjung keadilan dan demokratis. Adapun tindakan pelanggaran HAM yang bertentangan atau melanggar prinsip HAM itu sendiri seperti kasus-kasus pelanggaran HAM sebagai berikut dan umum ditemukan; 1) Tindakan fisik dengan melakukan penyiksaan dan perlakuan kejam yang tidak manusiawi cenderung merendahkan martabat manusia; 2) Penangkapan atau penahanan terhadap individu atau entitas tanpa dasar hukum yang jelas dengan alasan yang tidak sah; 3) Melakukan eksekusi mati tanpa melewati proses hukum yang sesuai prosedur dan adil; 4) Melakukan tindakan diskriminasi kepada suatu individu maupun entitas dengan memandang karakteristik seperti agama, ras, suku, jenis kelamin dan lain sebagainya; 5) Melakukan penindasan dan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, berbicara atau melakukan pers; 6) Penghilangan paksa dengan melakukan penculikan juga penahanan atau bahkan pembunuhan secara diam-diam dengan pemerintah tidak memberikan informasi apapun terkait apa yang terjadi pada korban tentang nasib mereka; 7) Pelanggaran terhadap hak untuk hidup, berpartisipasi dalam pemerintah dan hak lainnya yang berkenaan dengan hak sipil dan politik; 8) Kegagalan pemerintah untuk menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakatnya mendapat tempat tinggal, pendidikan, kesehatan,

serta layanan masyarakat yang baik dan layak; 9) Pengusiran paksa dan penyitaan tanah; 10) Kekerasan gender, tindakan mutilasi, perdagangan manusia dan hal lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak perempuan dan anak; 11) Kriminalisasi seksualitas; 12) Tindakan kekerasan kepada imigran maupun pengungsi; 13) Aksi militer berlebih kepada masyarakat sipil; 14) Kerusakan lingkungan yang kemudian membahayakan atau merugikan terhadap HAM. Oleh karena itu, aksi pelanggaran HAM seperti ini perlu dihadapi secara serius melalui kesadaran setiap individu untuk berbuat baik dan tidak melanggar HAM, penegakan hukum internasional dan nasional, aksi organisasi HAM dalam memperjuangkan HAM.³⁰

2.3 Bentuk Pelanggaran HAM di Mesir pada Era As-Sisi

Mesir di bawah kepemimpinan Presiden Abdul Fattah As-Sisi telah dilaporkan oleh beberapa pegiat HAM termasuk Amnesty Internasional sebagai aktor utama dalam menangani aksi-aksi pelanggaran HAM. Pemerintahan Abdul Fattah As-Sisi bisa dikatakan memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter. Dibuktikan dengan sejumlah kebijakan yang dia buat setelah menjabat menjadi presiden pada Juni 2014. Beberapa diantaranya seperti aparat keamanan diperbolehkan untuk memenjarakan, melarang, membatalkan aksi protes atau unjuk rasa yang mengancam keamanan pemerintah. Hukum yang disebut *protest law* ini kemudian menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berkeekspresi dan juga aparat keamanan yang kadang melakukan aksi berlebih kepada para

³⁰ I Nyoman Surata, *Sejarah Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia*, Kertha Widya 2, no. 1 (2014): 113–15.

demonstran sehingga biasanya terjadi penembakan. Kebijakan lain yang dibuat oleh rezim As-Sisi ialah pembatasan kegiatan dan pendanaan terhadap NGO dengan melakukan pengawasan terhadap organisasi atau kelompok yang ada di Mesir.³¹ Kemudian terdapat juga kebijakan terorisme yang mana pemerintah bisa mengambil tindakan kepada individu, kelompok atau apapun yang bertentangan dengan Pemerintah Mesir dan akan dimasukkan ke dalam daftar teroris. Dengan gaya kepemimpinan yang otoriter, selama periode 2014 hingga 2023 terdapat beberapa bentuk pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Pemerintah Mesir sebagai berikut:

Pertama, pada tahun 2013 seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, terjadi kudeta militer oleh Abdul Fattah As-Sisi. Saat dan setelah kudeta terjadi, banyak sekali pelanggaran HAM yang dilakukan terutama untuk membungkam golongan oposisi atau kelompok yang bertentangan dengan Abdul Fattah As-Sisi. Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi berupa pembatasan kebebasan berpendapat, aparat keamanan yang melakukan aksi berlebih seperti penembakan untuk menghadapi aksi demonstrasi rakyat, penangkapan secara sewenang-wenang, dan penghilangan paksa. Pelanggaran HAM ini cenderung terjadi pada pihak-pihak yang masih belum menerima dilengserkannya Muhammad Mursi. Golongan tersebut biasanya dari ikhwanul muslimin dan juga entitas kelompok Islamis. Selain itu juga terdapat tokoh liberal, sekuler dan

³¹ Rizki Ananda, *Analisis Faktor Kepemimpinan Terhadap Pelanggaran HAM Studi Kasus: Enforced Disappearance Di Mesir Oleh Rezim Abdel Fattah Al-Sisi*, Paper Knowledge . *Toward a Media History of Documents* 5 (2019): 929–37, 22694-45942-1-SM (1).pdf.

aktivis yang pro-demokrasi pada pemerintahan Mursi.³² Peristiwa paling dikenang pada tahun ini adalah saat terjadinya pembantaian di Kairo bagi para pendemo yang pro-Morsi seperti yang telah disebutkan di atas. Untuk jumlah pelanggaran HAM sendiri, Amnesty Internasional tidak bisa memastikan karena situasi yang sangat tidak kondusif pada saat itu.³³

Kedua, untuk tahun 2014 sendiri tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun ini banyak sekali hukuman eksekusi mati tanpa proses pengadilan. Di tahun ini juga banyak terjadi kasus *enforced disappearance* atau penghilangan paksa kepada aktivis, jurnalis, mahasiswa, kritikus yang tidak sejalan dengan Pemerintahan As-Sisi.³⁴ Salah satu studi kasus yang terjadi adalah saat terjadinya demonstrasi mahasiswa untuk menentang kebebasan berpendapat dalam penerapan kebijakan di bidang pendidikan. Setelah aksi demonstrasi tersebut terjadi kurang lebih 40 mahasiswa hilang dan ditahan. Mahasiswa yang ditahan mayoritas dari Universitas Kairo dan Universitas Al-Azhar.³⁵

Lalu pada tahun 2015-2017, angka pelanggaran HAM semakin pesat. Berdasarkan laporan Amnesty Internasional dan juga *Human Right Watch* terjadi sejumlah kasus *enforced disappearance* sebanyak 163 kasus pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 544 kasus penghilangan paksa. Angka

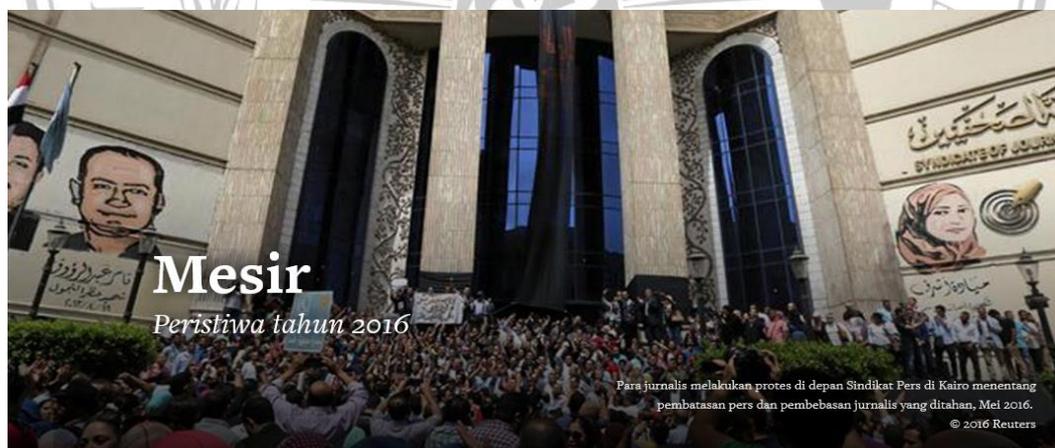
³² Pontoh, *Studi Institusionalisme: Analisis Kejatuhan Pemerintahan Muhammad Mursi Di Mesir Pada Tahun 2013*. Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2018, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42835>.

³³ Samir, *Kegagalan Demokratisasi Di Mesir Pasca-Arab Spring THE FAILURE OF DEMOCRATIZATION IN EGYPT POST ARAB SPRING*.

³⁴ Putri Bella et al., *ENFORCED DISAPPEARANCE : AKIBAT HUKUM PENCULIKAN ANAK SEBAGAI MODUS OPERANDI DALAM KONFLIK BERSENJATA OLEH BOKO HARAM*, 10 no. 5 (n.d.): 510–25.

³⁵ BBC, *PBB: Mesir Melanggar Hukum HAM*, BBC NEWS, 2014, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140325_mesir_pbb.

tersebut terus bertambah setelah laporan terbaru dari organisasi pegiat HAM di Mesir yakni *The Egyptian Co-Ordination for Human Rights and Freedoms* melaporkan penambahan kasus menjadi 630 kasus pada tahun 2016. Sedangkan untuk penahanan aktivis politik sebanyak 190 orang terjadi pada tahun 2015. Jumlah kasus penghilangan paksa ini tercatat mencapai 1176 kasus selama periode 2013-2017.³⁶ Berdasarkan invetigasi yang dilakukan oleh Amnesti Internasional yang bekerja sama dengan organisasi pegiat HAM di Mesir. Sejumlah korban ditahan di kantor polisi, National Security Agency (NSA), dan Kamp Pasukan Keamanan Pusat. Penahanan tidak resmi di luar kantor polisi membuat lembaga peradilan tidak bisa melakukan langkah investigasi dan proses peradilan. Hal inilah yang kemudian juga tergolong dalam pelanggaran HAM karena hukuman dijatuhkan tanpa proses pengadilan.³⁷



Gambar 2. 1 Aksi protes para jurnalis di depan Sindikat Pers untuk membebaskan jurnalis yang ditahan dan menentang pembatasan pers di Kairo tahun 2016

Sumber: Reuters

³⁶ Human Right Watch, *World Report 2017: Right Trends in Egypt*, Hrw.Org, 2017, [https://www-hrw-org.translate.goog/world-report/2017/country chapters/egypt](https://www-hrw-org.translate.goog/world-report/2017/country+chapters/egypt).

³⁷ BBC, *Puluhan Orang Ditahan Secara Rahasia Di Mesir*, BBC NEWS, 2015, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/07/150721_dunia_mesir_tahanan.

Pihak keamanan atau polisi berhasil menangkap sejumlah pihak terkait adanya protes tersebut. Di tahun 2016, kritik publik terhadap pemerintahan masih menjadi larangan dan menjadi target penangkapan. Komisi Hak dan Kebebasan Mesir yang merupakan kelompok independent mendokumentasikan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Badan Keamanan Nasional Mesir yang juga melakukan penyiksaan terhadap para korban yang ditangkap sewenang-wenang tanpa bukti kuat melalui pengadilan militer yang ditujukan kepada warga sipil.³⁸

Untuk tahun 2017 hingga 2023, permasalahan HAM yang sama terus terjadi tak kunjung selesai berdasarkan laporan dari Amnesti Internasional dan Human Right Watch. Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga terus mengkritisi terkait dengan krisis HAM yang terjadi di bawah pimpinan As-Sisi. Pelanggaran oleh pasukan keamanan Mesir dan juga polisi dalam penangkapan, penyiksaan, penghilangan paksa terus terjadi pada puluhan hingga ratusan masyarakat sipil yang mana mayoritas adalah aktivis dan demonstran. Di Mesir sendiri, para aktivis yang sudah dibebaskan dari penjara wajib memberikan laporan rutin kepada kantor pasukan keamanan. Intimidasi dan juga pelecehan juga menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap para korban. Berdasarkan laporan 2021 dari Human Right Watch dan Amnesti Internasional, kondisi penjara yang tidak layak dan mengerikan yang dilindungi dari pengawasan independent. Selain itu, akses kesehatan terhadap para tahanan juga belum memadai dan secara rutin dicabut oleh pihak berwenang hingga tak sedikit

³⁸ Human Right Watch, *World Report 2017: Egypt*, 2017, https://www-hrw-org.translate.google/world-report/2017/country-chapters/egypt?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

tahanan yang meninggal dalam tahanan. Studi kasus dari kondisi penjara dan kematian bisa didapat melalui wawancara Amnesty Internasional kepada keluarga Abd Al-Moniem Abu al-Fotouh yang merupakan mantan kandidat presiden dan kepala Partai Kuat Mesir yang ditahan tanpa proses peradilan pada tahun 2018. Abu Al-Fotouh kemudian meninggal akibat beberapa kali terkena serangan jantung akan tetapi permohonan dari keluarganya ditolak oleh pasukan keamanan untuk dilakukan pemindahan ke rumah sakit.³⁹

Pada tahun 2021, berdasarkan keterangan dari Front Hak Asasi Manusia Mesir angka penerapan hukuman mati dan eksekusi meningkat. Mereka mengklaim terdapat proses yang tidak adil dalam pengadilan massal yang terjadi. Pada enam bulan pertama di tahun 2021 terjadi setidaknya pengeksekusian terhadap 80 orang. Berdasarkan laporan dari Amnesty Internasional pada tahun 2021, Mesir menjadi negara peringkat tiga terburuk dalam penjatuhan hukuman mati. Para pembangkang yang tidak sejalan dengan pemerintahan Abdul Fattah As-Sisi diadili dan tidak dapat diajukan banding karena pihak berwenang menggunakan Pengadilan Darurat Keamanan Negara yang keputusannya tidak dapat ditolak sesuai dengan undang-undang yang diterapkan oleh As-Sisi pada tahun 2017. Pelanggaran terhadap hak Perempuan, orientasi seksual, dan juga identitas gender di Mesir turut terjadi seperti pada studi kasus Perempuan yang melakukan kampanye di media sosial pada bulan Maret 2021 ditangkap karena menentang amandemen undang-undang status pribadi yang melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Lalu pada hak sosial, ekonomi, dan kesehatan

³⁹ Human Right Watch, *World Report 2022: Egypt*, 2022, <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/egypt>.

juga menjadi bidang pelanggaran HAM di Mesir yang mana para pebisnis dan pekerja yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah didapati tuduhan menggunakan undang-undang terorisme.⁴⁰

Laporan Amnesty Internasional tahun 2022-2023 menyatakan secara umum tindak pelanggaran HAM seperti penindasan kepada kebebasan berserikat, berkumpul hingga berpendapat masih menjadi masalah serius di Mesir selama tidak adak kebijakan untuk merevisi hukum yang berlaku di Mesir untuk menangani permasalahan HAM di Mesir. Kurangnya respon pemerintah terhadap permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual, kegagalan pemerintah melindungi hak para pekerja, penahanan dan penindasan terhadap masyarakat yang rumahnya digusur oleh pemerintah untuk proyek pembangunan karena melakukan aksi protes, banyaknya kematian para tahanan di penjara karena akses medis yang sulit, kegagalan pemerintah melindungi kaum agama minoritas untuk melakukan ibadah, dan kegagalan pemerintah untuk mengatasi para pengungsi di Mesir sehingga banyak juga yang ditahan dan dipulangkan secara paksa ke negara asal masih menjadi catatan kelam terhadap penanganan HAM di Mesir.⁴¹

⁴⁰ U.S. EMBASSY, *EGYPT 2022 HUMAN RIGHTS REPORT*, 2022, <https://eg.usembassy.gov/egypt-2022-human-rights-report/>.

⁴¹ Amnesty International, *Report 2022/2023 - The State of the World's Human Rights*, 2023, www.amnesty.org.